

BAB II

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

I. PENGERTIAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

Dalam perkembangan istilah Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan sebuah istilah terjemahan dari istilah asing NGO atau Non Government Organisation. Namun pada awalnya terjemahan dari NGO ini, kebanyakan dikenal dengan nama ORNOP atau organisasi non pemerintah, Menurut **Din Yati AR** seorang aktifis LSM mengatakan ” Bahwa istilah ini digunakan lebih karena bentuk perlawanan dari masyarakat terhadap negara dengan idiologi pembangunannya” jadi benar-benar organisasi yang berada di luar pemerintahan. (Wawancara : 28 November 2001)

Pada awal-awal organisasi non pemerintah dikenal di Indonesia dengan istilah Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat yang mana lembaga ini merupakan lembaga yang memberikan bantuan kepada masyarakat dan merupakan terjemahan langsung dari ORNOP. Dalam masyarakat sendiri kelompok-kelompok yang ada pada pada waktu itu dikenal dengan Lembaga Swadaya Masyarakat. Namun setelah berkembang lebih jauh pada awal 1980-an istilah Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat berubah dengan sendirinya

menjadi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sedangkan pada tingkat masyarakat di kenal dengan Kelompok Swadaya Masyarakat.¹

Banyak perdebatan yang timbul dikalangan para aktifis LSM mengenai istilah yang hendak digunakan namun yang terpenting adalah fungsi dari organisasi itu sendiri, yang mana fungsi tersebut adalah untuk mengembangkan kemandirian masyarakat. Pada jaman Orde Baru kebanyakan organisasi ini lebih memilih menggunakan istilah LSM dari pada ORNOP, karena jikalau menggunakan istilah ORNOP maka konotasi yang muncul dari istilah ini adalah merupakan lawan dari pemerintah, sebab pada jaman Orde Baru yang bukan pemerintah akan dilawan atau dihancurkan. Oleh karena itu kebanyakan organisasi ini banyak menggunakan istilah LSM dari pada ORNOP.

Kemunculan LSM merupakan sebuah tanggapan terhadap fenomena pembangunan yang terjadi pada waktu itu. Menurut Yando Zakaria seorang aktifis LSM dari INSIST mengatakan bahwa :

Lahirnya LSM merupakan sebuah respon terhadap kegagalan dari mesin-mesin perubahan sosial yang ada “. Kegagalan mesin-mesin perubahan sosial seperti negara, birokrasi mengakibatkan bermunculan organisasi alternatif salah satunya adalah LSM yang mana kehadirannya untuk melawan ketidakadilan yang terjadi serta meningkatkan kemandirian dan keswadayaan masyarakat.
(Wawancara ; 12 february 2002)

Dalam Kamus Bahasa Indonesia istilah Swadaya diartikan sebagai “Kekuatan Sendiri” (Poerwardaminta; Balai Pustaka; 1985) dengan demikian

¹ Dalam penelitian ini Istilah yang di gunakan oleh peneliti untuk menerangkan mengistilahkan istilah selanjutnya adalah Lembaga Swadaya Masyarakat, tidak ada maksud lain dari penggunaan istilah ini hanya karena peneliti menginginkan adanya kesamaan persepsi mengenai istilah ini.

dalam mengembangkan serta meningkatkan kemandirian yang dimiliki oleh masyarakat sudah barang tentu mengandalkan kekuatan sendiri, dengan demikian unsur-unsur dari luar masyarakat hanyalah memberikan pendampingan kepada kelompok masyarakat tersebut untuk menuju kemandirian. Menurut **Dadang Julianta**, konsep swadaya dibatasi sebagai prakarsa sendiri dan independen sifatnya. Mendampingi berarti mengembangkan hubungan kesejajaran, hubungan pertemanan dan persahabatan. Hubungan tersebut adalah hubungan antara dua subjek secara dialogis, dalam hal ini pendamping dan kelompok yang didampingi adalah **subjek**, sedangkan yang menjadi **objek** adalah keluhan, kebutuhan, masalah kelompok dampingan. (**Saragih Sebastian 1995 ; 1**).

Oleh karena itu pendampingan adalah sebuah upaya transfer pengetahuan baik bersifat horisontal, artinya diantara sesama masyarakat; maupun secara vertikal artinya dari lembaga sekunder seperti LSM terhadap kelompok sasaran primer di masyarakat. Secara kongrit bentuk dari pendampingan dapat di jelaskan sebagai berikut :

- a. Masalah harus diidentifikasi oleh masyarakat sendiri, bukan oleh orang luar.
- b. Kebutuhan harus ditentukan oleh masyarakat sendiri, sedangkan orang luar hanya membantu.
- c. Pilihan dan kebutuhan apa yang baik harus dibuat sendiri oleh masyarakat, bukan oleh orang luar. (**Saragih Sebastian 1995 ; 1**).

Adanyakan pandangan mengenai konsep pendampingan yang dikembangkan oleh LSM seperti yang terurai diatas maka dengan demikian posisi kelompok-kelompok dampingan sejajar dengan pendamping dalam hal ini LSM. Hal semacam ini jelas sangat membedakan dengan organisasi-organisasi

kemasyarakatan lainnya yang memiliki anggota, struktur organisasinya yang hirarkis. Dan untuk membedakan antara organisasi-organisasi kemasyarakatan dengan LSM, ada beberapa perbedaan antara lain seperti : (Saragih Sebastian 1995 ; 5).

- a. Bersifat nirbala (non profit), didirikan bukan untuk mencari keuntungan.
- b. Bukan perpanjangan tangan pemerintah, organisasi politik, organisasi bisnis dsbnya. Tetapi mereka lebih Independen.
- c. Meningkatkan swadaya masyarakat.
- d. Memperhatikan pelestarian alam.

Dengan kelebihan ini maka menjadi mampu, lebih cepat dan kongrit dalam memfasilitasi proses pencerahan kepada masyarakat. Pada Hakikatnya LSM adalah organisasi yang bertujuan untuk mengembangkan keswadayaan ditingkat *grassroot*², biasanya melalui penciptaan dan dukungan terhadap kelompok-kelompok swadaya lokal tanpa adanya kepentingan politik dan finansial. Ralston (Prisma.No; 4 tahun XVII /1988) mencatat LSM dapat memainkan beberapa peranan dalam mendukung kelompok swadaya yang dikembangkan termasuk :

- 1) Mengidentifikasi kebutuhan kelompok lokal dan taktik-taktik untuk memenuhi kebutuhan kelompok ini.
- 2) Melakukan mobilisasi dan agitasi untuk usaha aktif mengejar kebutuhan-kebutuhan yang telah diidentifikasi tersebut.
- 3) Merumuskan kegiatan jangka panjang untuk mengejar sasaran pembangunan lebih umum.
- 4) Menghasilkan mobilisasi sumber daya lokal atau eksternal untuk kegiatan pembangunan pedesaan.
- 5) Pengaturan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ini. Tiap LSM biasanya menjalankan semua fungsi ini, setidaknya pada waktu yang sama.

² Istilah *grassroot* sendiri berarti " akar rumput ". Istilah ini banyak digunakan oleh kalangan LSM untuk mengartikan atau mengistilahkan untuk kelompok-kelompok masyarakat di tingkat bawah yang menjadi bagian dari rekan kerja par aktivis LSM tersebut.

Jika LSM mengembangkan kelompok-kelompok binaan yang ada di *grassroot* yang berswadaya, birokrasinya sendiri harus bersifat luwes dan terdesentralisasi. Hal utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan setiap kegiatan yang dilakukan adalah derajat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam setiap kerja-kerja LSM agar masyarakat dapat terhindar dari berbagai permasalahan yang dapat menindas mereka. Sebab tujuan dan ide partisipasi masyarakat yang dimunculkan pada dasarnya adalah dalam rangka pengembangan sumber daya manusia untuk kemandirian dan pemulihan harkat dan martabat manusia karena hal tersebut merupakan unsur utama untuk bisa berpartisipasi.

1.1 Cita-cita Lembaga Swadaya Masyarakat

Pada dasarnya Cita-cita LSM adalah menumbuhkan keswadayaan masyarakat menuju dunia yang lebih manusiawi dan demokratis. Penindasan di dunia harus dihapuskan dari muka bumi, sehingga semua orang harus mempunyai kemandirian dalam mengambil keputusan yang menyangkut perubahan dalam dirinya dan penumbuhan keswadayaan tersebut merupakan usaha menuju kearah tersebut.

Dalam menciptakan masyarakat yang manusiawi dan demokratis serta mewujudkan dunia yang lebih baik, maka sudah tentu LSM berpihak pada kaum lemah, kaum miskin yang tersingkir, tertindas dan sering diabaikan dalam pengambilan keputusan baik lokal maupun nasional. Pemihakan ini diwujudkan

dalam bentuk pendampingan yang menjadikan kaum miskin dan lemah sebagai sahabat, teman, kawan dsb-nya. Selain itu cita-cita yang dapat terlihat pada kelompok-kelompok dampingan LSM adalah dengan berusaha membangkitkan semangat demokratis, semangat musyawarah yang lugas dan spontan³.

Dengan demikian ada satu kata yang ingin di pegang oleh LSM dalam mewujudkan cita-citanya, kata tersebut adalah 'kesetaraan'. Kesetaraan bagi manusia mengandung arti bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan setara antara satu dengan yang lainnya, jadi manusia memiliki kesadaran yang tentunya tidak dimiliki oleh makhluk lain. Sementara Kesadaran memiliki tiga sifat khas :

1. Berrefleksi (Melihat diri).
2. Berinteraksi (Bergaul dengan orang lain).
3. Menemukan hal yang baru.

Kesadaran ini membuat manusia mampu menguasai dan mengatur dunia. Jadi pemecahan masalah yang dialami masyarakat korban harus yang berdasarkan atas pemahaman masyarakat itu sendiri dan bukan atas pemahaman orang lain. Orang lain mungkin bisa memberikan konsep pemecahan masalah yang baik menurutnya dan hal ini tidak bisa dipaksakan walaupun hendak dilakukan maka ada proses pemahaman bersama (Saragih Sebastian 1995; 17).

³ Namun musyawarah disini tentunya berbeda dengan pengarahannya, *briefing* ataupun pemberitahuan seperti hal yang dilakukan oleh pemerintah karena hal itu terjadi proses hegemoni yang membuat masyarakat tidak dapat menyampaikan apa yang dibutuhkan. Musyawarah berarti berbicara bersama untuk memecahkan berbagai yang dihadapi oleh kaum lemah guna mencari jalan keluarnya serta mengembangkan rasa percaya diri dari kaum yang tertindas.

1.2 Harapan dan Realita

Cita-cita adalah sesuatu yang ingin dicapai. Karena ada usaha untuk mencapainya maka hal itu akan menjadi sebuah harapan. Realita adalah kenyataan mengenai sesuatu yang benar-benar terjadi, namun pada kenyataannya realita selalu tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan. Oleh karena itu harapan untuk memberikan kesetaraan serta membebaskan masyarakat dari segala bentuk ketertindasannya terkadang tidak berjalan dengan mulus.

LSM yang bercita-cita memandirikan dan membangkitkan keswadayaan masyarakat, untuk mencapai cita-cita tersebut diperlukan kerja-kerja yang tidak hanya membutuhkan tenaga, pikiran namun juga dana. Dalam kenyataannya LSM selalu tidak dapat terlepas dari adanya lembaga donor yang selalu memberikan bantuan berupa dana untuk kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh LSM. Dengan demikian keberadaan Lembaga Donor sangatlah penting bagi berlangsungnya berbagai kegiatan yang akan dilakukan oleh LSM.

Dalam teori organisasi swadaya masyarakat ini memformulasikan dan membuat program mereka sendiri kemudian menghubungi lembaga donor untuk meminta bantuan guna merealisasikan program tersebut. Namun terkadang program ini harus sesuai dengan kebijaksanaan dari pemberi dana (**Prisma 4 1988;26**).

Hal semacam ini menimbulkan banyak sekali permasalahan bahkan setiap kegiatan harus disesuaikan dengan keinginan dari lembaga donor tersebut.

Mamang LSM tidak *didikte*⁴ langsung oleh lembaga donor, hanya saja harus menyesuaikan dengan trend yang ada pada lembaga donor. Menurut **Dadang Juliantara** seorang aktivis LSM bahwa :

“ Bentuk intervensi yang dilakukan oleh Lembaga Donor kepada LSM memang begitu besar, namun ada juga LSM yang tidak mudah di intervensi sebagai contoh kalau ada LSM yang sudah memiliki ide yang telah dituangkan dalam satu program tertentu namun ketika dia mengetahui bahwa ada penawaran lain dari lembaga dana maka ia akan berpaling untuk mencari proyek tersebut, namun ada juga yang tidak mau dan mencari yang lain “ (Wawancara; 23 November 2001).

Kemudian akan timbul kenapa swadaya dari masyarakat sangat kecil ? hal ini disebabkan karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh LSM tidak mencerminkan apa yang menjadi kehendak dari masyarakat melainkan kehendak dari LSM yang hanya menjadikan masyarakat sebagai objek. Akibatnya masyarakat akan sangat tergantung kepada LSM yang dijadikan objek dijual kepada lembaga dana untuk mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya.

1.3 Ruang Lingkup Kerja Lembaga Swadaya Masyarakat

Kelompok binaan, kelompok dampingan, kelompok sasaran ataupun partisipan merupakan istilah yang populer digunakan dalam kegiatan pengembangan kemandirian masyarakat. Namun perkembangan demi perkembangan yang terjadi dalam tubuh LSM membuat mereka (masyarakat

⁴ Dalam hal ini pengetahuan mengenai *didikte* merupakan ungkapan lain dari intervensi yang dilakukan oleh lembaga dana terhadap LSM.

miskin, lemah) sekarang lebih populer dengan sebutan kelompok dampingan atau partisipan.

Kelompok-kelompok yang menjadi dampingan tersebut terdiri dari masyarakat yang kurang beruntung, tersingkir ataupun menjadi korban dari proses pembangunan yang sedang berlangsung. LSM berpihak dan berakar dari masyarakat tersebut dalam memberikan pembebasan bagi masyarakat agar supaya hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terwujud lewat partisipasi yang mereka lakukan sendiri. Kelompok-kelompok semacam ini ada di mana-mana baik di kota maupun di desa dan biasanya mereka tinggal pada daerah-daerah miskin dengan tingkat pendapatan yang rendah.

Kelompok-kelompok ini misalnya kelompok buruh, kelompok masyarakat yang tergusur dari tanahnya secara paksa, petani yang di lilit renternir, penduduk yang lingkungannya di cemari oleh pabrik tertentu. Kelompok-kelompok masyarakat seperti petani, nelayan dan kaum urban yang sering di cap sebagai pemalas, namun jikalau mau dilihat para kelompok ini sudah bekerja seharian penuh mulai dari pagi hingga sore hari dan tetap mereka tidak mendapatkan kehidupan yang layak. Apakah ini adil jika menyebut mereka pemalas ? **(Saragih Sebastian ; 1995 hal 31).**

Dengan demikian Ruang lingkup kerja dari Lembaga Swadaya Masyarakat pada intinya adalah membebaskan masyarakat dari bentuk-bentuk ketidakadilan yang terjadi, dengan berbagai cara mulai dari pendampingan, advokasi, penyebaran wacana dan lain-lain.

1.4 Pendekatan yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat

Ada banyak pendekatan yang dilakukan dalam pengembangan masyarakat, sama halnya pula dengan LSM ada macam-macam pendekatan yang dilakukan. Pendekatan versi LSM lahir sebagai reaksi terhadap pendekatan-pendekatan konvensional yang selama ini dilakukan oleh banyak kalangan aktivis LSM.

Kritik-kritik yang dikeluarkan dari para aktivis LSM terhadap pendekatan konvensional antara lain karena pendekatan pengembangan masyarakat selama ini:

1. Bersifat atas-bawah dan tidak partisipatif selain itu menimbulkan kesalahan dalam pelaksanaan juga kurang demokratis.
2. Memisahkan masyarakat dalam dua kelompok besar yaitu moderen dan tradisional.
3. Terlalu bersifat makro, kurang menyentuh pada persoalan mikro. Pada hal ini paling sering di jumpai dalam masyarakat.
4. Berorientasi pada masyarakat yang mencetuskannya sehingga tidak bersifat kontekstual dan tepat guna.
5. Tidak berorientasi pada perubahan masyarakat dan hakikat manusia yang selalu berubah. Cenderung mempertahankan, membenarkan, dan mengesahkan keadaan yang sudah ada.
6. Masih dilatarbelakangi oleh struktur yang tidak adil. Memisahkan elit massa yang diperintah dengan yang memerintah.
7. Adanya orientasi dari luar, yang bersifat memaksa dan dan menolak perubahan dari dalam dan proses penyadaran.
8. Cenderung bersifat teoritis. Membedakan antara teori dan praktek. Perbedaan ini dilatar belakang oleh kedudukan perguruan tinggi sebagai menara gading dan kesombongan golongan terdidik yang berdiri di belakang perbedaan istilah bodoh dan pintar.
9. Bersifat bebas nilai, tidak kritis dan tidak memihak. Kenyataan pengembangan masyarakat tidak pernah bebas nilai, bebas kepentingan dan bebas kekuasaan. Oleh karena itu perlu pertimbangan segi-segi subjektif dan pemihakan. (Saragih Sebastian ; 1995 hal 32).

Secara umum kerangka kerja yang biasa dilakukan dalam proses pengembangan masyarakat adalah :

1. Penelitian :

- Merumuskan Masalah

- Mencari metode/pendekatan pemecahan masalah.

2. Pemecahan Masalah

Aksi pemecahan masalah pengembangan masyarakat lewat berbagai kegiatan.

3. Evaluasi

Menguasi usaha pemecahan dari masalah yang dihadapi oleh masyarakat. (Saragih Sebastian ; 1995 hal 31).

Perbedaan penting dari pendekatan konvensional dan pendekatan yang dilakukan oleh LSM adalah bahwa pendekatan konvensional menempatkan kegiatan penelitian dan evaluasi dilakukan sepenuhnya oleh ilmuwan/ahli, profesional, elit, atas nama direktur, manager, konsultan atau kepala proyek. Pada usaha pemecahan masalah atau pengembangan masyarakat dijadikan objek yang pasif.

Metode penelitian konservatif bertitik tolak dari pemisahan teori dan praktek, begitu pula antara nilai dan ilmu pengetahuan. Selain itu juga pendekatan konvensional juga sering disebut dengan pendekatan rekayasa sosial. Masyarakat di dudukan sebagai objek yang menerima apa yang diberikan, diperintahkan dan telah diatur oleh kepala proyek

Menurut salah satu Aktivist LSM **Meth Kusumohadi**, Koordinator **USC-Satunama** mengatakan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh kebanyakan LSM adalah:

Sebuah Pendekatan yang mana pendekatan ini menitikberatkan kepada pendekatan kepada rakyat yang menderita, jadi inti dari perjuangan LSM adalah memahami betul apa yang sedang di alami oleh rakyat (Wawancara 31 Januari 2002).

Dengan pendekatan kepada rakyat yang menderita maka, Proses pengembangan masyarakat harus dilakukan oleh masyarakat itu sendiri

berdasarkan pemahamannya, sedangkan pihak luar berfungsi sebagai fasilitator atau kasalitor dalam berlangsungnya proses tersebut. Hal ini tentunya berawal dari anggapan bahwa masyarakat bermasalah adalah pihak yang lebih memahami persoalan yang dihadapi, oleh karena itu masyarakat itu sendirilah yang akan menyelesaikan permasalahannya sendiri. (Tjahyono I ; 1988), ciri pendekatan model ini adalah bahwa :

1. Kegiatan berdasarkan kebutuhan kelompok dampingan.
2. Kegiatan berdasarkan kemampuan dan potensi kelompok dampingan.
3. Kegiatan direncanakan, dilaksanakan dan dinikmati oleh kelompok dampingan.
4. Kegiatan dievaluasi oleh kelompok dampingan.

Ada dua pendekatan utama yang dilakukan oleh LSM dalam pemecahan masalah kelompok dampingan yaitu pengorganisasian masyarakat, biasanya disebut *Community Organizing* dan *Community Development* atau pengembangan organisasi. Pengorganisasian masyarakat bertujuan meningkatkan solidaritas, karena dengan adanya solidaritas masyarakat maka kedudukan masyarakat akan menjadi kuat kalau mereka bersatu. Caranya dengan mengajak masyarakat mempersoalkan permasalahannya, ketidakadilan apa yang membuat masalah ini terjadi. Dengan memahami persoalan yang dihadapi maka masyarakat diharapkan akan menimbulkan perasaan senasib yang akan membuat serta membangkitkan semangat persatuan di antara mereka. Persatuan dikalangan masyarakat bisa menjadi alat untuk melawan ketidakadilan yang mereka terima.

II. Sejarah Lembaga Swadaya Masyarakat

2.1 Berawal dari Non Government Organisation

Seperti yang diuraikan diatas bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat telah hadir pada zaman penjajahan, sama halnya ketika timbulnya LSM didunia barat yang muncul sebelum abad dua puluhan. Di dunia barat LSM di kenal dengan nama NGO (*Non Government Organisation*) yang tentunya mempunyai sejarah yang tidak begitu panjang. NGO pada awalnya lahir secara tipikal dan tumbuh pada massa perjuangan kemerdekaan. Misalnya, Gerakan Gandhi di India yang mempunyai banyak pengikut sampai sekarang dan terus berkembang, dengan kegiatan meliputi pusat kerajinan tenun dan inisiatif teknologi tepat guna.

NGO yang juga memasuki panggung perjuangan setelah perang dunia I misalnya CARITAS yang mendapat dukungan dari gereja Katolik dan *save children fund*. Kehadiran mereka semakin kuat dengan pada menjelang akhir perang dunia II yang ditandai dengan berdirinya OXFAM pada tahun 1942, *Catholic Relief Service* pada tahun 1943 dan disusul dengan *Cooperative for American Relief Everywhere* (CARE) pada tahun 1945. lembaga-lembaga ini pada awalnya bergerak dalam bidang penyantunan, terutama di negara-negara eropa yang tercabik-cabik akibat perang dunia ke II (Clark 1995 ; hal 37).

Selama dasa warsa 1950 dan 1960 –an jumlah NGO bertambah banyak dan fokusnya beralih bersifat progresif menjadi menyerang gejala-gejala kemiskinan saja. Untuk mengentaskan kemiskinan itu sendiri diperlukan bantuan untuk meningkatkan kapasitas memenuhi kebutuhan orang miskin dengan sumber-

sumber yang dapat mereka kontrol. Sedang peralihan dari barak-barak pengungsi, pusat-pusat pemberian makanan serta rumah sakit ke pedesaan dan daerah kumuh dimana mereka melaksanakan proyek-proyek yang dapat membuka mata NGO mengenai realitas kemiskinan.

Pada awal periode pembangunan pekerjaan yang dilakukan disesuaikan dengan aliran pemikiran modernisasi konvensional, yang mana pemikiran ini berusaha membantu masyarakat agar bisa berkembang sesuai dengan masyarakat barat dengan menerapkan pemikiran barat, teknologi dan keahlian masyarakat barat. Akan tetapi perkembangan pemikiran ini tidak dapat bertahan lama karena kemudian banyak mendapat kritikan akibat negatifnya model pembangunan ini. Pada akhirnya mereka beralih pada saat peran baru yaitu memberikan bantuan kepada LSM-LSM lokal dan gerakan-gerakan mandiri. Ciri pekerjaan ini antara lain berskala kecil, menggunakan pemimpin setempat dan memberikan dukungan usaha kebebasan ekonomi dan politik dari orang miskin. (Clark 1995 ; hal 38).

Pada tahun 1961 misalnya, OXFAM Inggris membuat suatu keputusan untuk tidak memberikan bantuan kepada organisasi misionaris namun mengalihkan semua bantuan kepada organisasi-organisasi yang didukung oleh penduduk asli. Oleh karena itu bantuan yang memberikan pada awalnya telah dapat menjadi NGO bagi kalangan mereka sendiri. Banyak pula organisasi-organisasi yang tumbuh berhasil menjadi lembaga yang bersifat nasional dan juga dapat menjadi lembaga penghubung antara NGO lokal dan NGO Utara.

Pada tahun 1970-an spektrum ini menjadi lebih luas. Banyak NGO yang terlibat dalam kegiatan mandiri menyadari masih terdapat keterbatasan dalam menentukan sejauh mana kegiatan mandiri ini dapat berjalan, karena lebih pada kenyataan lebih diarahkan oleh kepentingan ekonomi dan politik yang terselubung. Pembangunan telah semakin tampak sebagai proses pembebasan orang miskin baik dari penindasan fisik maupun keinginan untuk keluar dari kemiskinan. Sepanjang tahun 1970-an secara perlahan-lahan tumbuh kesadaran bahwa kemiskinan itu memiliki sifat politik yang pada akhirnya melahirkan gerakan advokasi sebagai kegiatan baru bagi NGO.

Hal ini pertama kali dipelopori oleh NGO Brazil yang melakukan serta memelopori pendekatan “penyadaran” yang mana pendekatan ini merupakan kombinasi antara pendidikan politik, organisasi sosial, dan pembangunan masyarakat lapis bawah yang dirancang tidak hanya untuk meningkatkan taraf hidup namun juga agar masyarakat dapat melihat bahwa eksploitasi atas diri mereka dan menyadarkan mereka untuk melihat bahwa mereka punya peluang untuk menghentikan eksploitasi dengan jalan organisasi massa (Clark John;1995;hal 39).

Di seluruh dunia ketiga, NGO memusatkan perhatian untuk meningkatkan struktur agar membantu orang miskin dalam perjuangan mereka melawan ketidak
Akibatnya dari adanya organisasi di tingkat bawah membawa perubahan dengan cepat, meskipun sering kali dinyatakan secara informal, bahkan tidak pernah diketahui oleh pemerintah itu sendiri. NGO utara sering kali tidak bisa

menyalurkan dana kepada organisasi-organisasi lokal namun melewati organisasi-organisasi perantara tingkat nasional.

Selanjutnya pada tahap perkembangan NGO bertindak sebagai menejer bantuan dengan jumlah yang cukup tinggi, mulai dari permasalahan buruh, tani, hukum dan ham, penajahan, lingkungan, sampai pada permasalahan anak-anak. Akhirnya NGO dalam tahap perkembangan sejarah dapat tercermin dalam enam aliran pemikiran yang besar : (Clark John ; 1995 ; hal 43).

1. Agen penyantunan dan Kesejahteraan, misalnya seperti *Catholic Relief Service* ataupun berbagai kelompok masyarakat misionaris.
2. Organisasi Pengembangan Tehnologi. NGO yang melaksanakan proyek mereka untuk memelopori pendekatan baru atau memperbaiki pendekatan yang sudah ada, dan cenderung untuk tetap mengkhususkan diri pada bidang yang mereka pilih. Sebagai contoh British Intermediete Tehnologi Development Grup, the Internasional Aga Khan Foundation, Grament Bank Of Bangladesh 6-S.
3. Kontraktor Pelayan Umum, NGO yang sebagian besar yang didanani oleh pemerintah utara dan bekerja sama dengan pemerintah selatan dan agen pemberi bantuan resmi. NGO ini di kontrak untuk melaksanakan komponen dari komponen dari program resmi karena dirasakan bahwa ukuran dan fleksibilitas mereka akan membantu pelaksanaan program tersebut lebih efektif dari pada departemen pemerintah. Contohnya termasuk CARE dan Emergency Social Fund.
4. Agen Pembangunan Masyarakat, NGO Utara dengan mitranya di selatan banyak manaruh perhatian pada kemandirian, pembangunan sosial dan demokrasi lapis bahwa. Contohnya OXFAM, Bangladesh Rural Advancement Commitee (BRAC), Centro Ecummenico de Documentcatao e Informacao (CEDI), Federacao Asistencia Social e Educacional (FASE) dari Brasil.
5. Organisasi Pengembangan Masyarakat Bahwa, NGO selatan yang anggotanya adalah orang miskin dan tertindas dan yang berupaya membentuk satu proses pembangunan masyarakat. Mereka sering mendapat bantuan dari PDAs meski banyak dari mereka yang tidak mendapat bantuan dana dari luar sama sekali. Contoh termasuk serikat pekerja pedesaan di Brasil.
6. Kelompok Jaringan Advokasi. Organisasi yang tergabung dalam aliran ini biasanya tidak memiliki proyek tetepi keberadaan mereka terutama untuk melakukan pendidikan dan hobi. Contohnya adalah Freedom

from Debt Coalition dari Filipina, The Third Word Network yang berada di Penang.

2.2 Perjalanan Dari ORNOP ke LSPM dan LSM

Pengertian mengenai ORNOP dan LSM merupakan sebuah perdebatan yang panjang baik di kalangan aktifisnya maupun masyarakat itu sendiri. Sampai saat ini perdebatan mengenai Istilah ORNOP, LSPM dan LSM masih hangat. Namun pembahasan mengenai organisasi-organisasi kemasyarakatan ini sering menggunakan pengertian umum yang mengikuti terminologi dari PBB. Terminologi ini lazim disebut dengan nama *Organization Non Government (NGO)* yang kemudian di Indonesiakan menjadi Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) dalam arti yang umum pengetahuan mengenai ORNOP mencakup semua organisasi-organisasi yang berada diluar jalur formal pemerintahan, dan tidak dibentuk oleh atau merupakan bagian dari pemerintah. (Prisma ; April 1983; hal 11).

Apapun istilah yang di gunakan untuk Organisasi Non Pemerintah tersebut pada dasarnya menurut pandangan Sosiologis dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar (Prisma ; April 1983; hal 12), *Pertama*, Kelompok Primer yaitu kelompok masyarakat yang mempunyai aspirasi dan kegiatan bersama dengan ciri hubungan yang dekat dan intim sekali serta bersifat sekarela, dimana interaksi di antara para anggotanya terjadi dari hari kehari dan tatap muka, untuk berbagai urusan saling tolong-menolong yang menyangkut kepentingan kelompok tersebut. Kelompok ini biasanya merupakan kelompok

kecil di lapisan bawah yang menurut istilah saat ini lebih dikenal dengan nama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Kelompok kedua yaitu kelompok Sekunder, kelompok ini merupakan kelompok yang tumbuh dan berkembang dari tengah masyarakat dan para anggotanya mempunyai kepentingan atau kegiatan bersama, untuk melakukan usaha bersama atau kepentingan bersama dalam lingkup dan skala yang relatif terbatas dan untuk mencapai tujuan kemasyarakatan yang tidak mengejar keuntungan materil. Kelompok ini biasanya lebih besar dan teroganisir, para anggotanya lebih banyak bahkan mempunyai hubungan yang lebih luas jika dibandingkan dengan kelompok primer. Namun komunikasi yang terjadi pada kelompok sekunder tidak selalu terjadi mengingat umumnya corak corak kegiatan ataupun tujuan kelompok sekunder ini membangkitkan swadaya dari kelompok primer.

Mengingat terlalu luas istilah yang di gunakan oleh ORNOP baik arti maupun implikasinya karena bukan saja berarti organisasi pembangunan masyarakat seperti yang ada pada LSM dan LPSM, maka untuk menghindari dari pengertian yang terlalu luas maka sejak tahun 1978 organisasi-organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam pembangunan sosial ekonomi, khususnya dalam pengembangan masyarakat pedesaan Indonesia tidak lagi menggunakan istilah ORNOP melainkan menggunakan istilah LSM dan LSPM yang lebih dianggap cocok dengan citra serta bentuk kegiatan mereka sebenarnya. Baru pada tahun 1981 dalam sebuah seminar nasional mengenai peranan organisasi tersebut

dalam pengembangan masyarakat istilah organisasi non pemerintahan resmi diganti oleh Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat. Namun istilah LSPM sendiri belum begitu populer bagi kalangan awam, dan lagi karena pengertian dari LSPM tidak termasuk lembaga-lembaga penerbitan, lembaga penelitian, biro konsultasi, lembaga studi (Prisma ; April 1983; hal 13).

III. Perkembangan Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia

Perkembangan LSM Indonesia yang kian hari semakin pesat tentunya hal ini disesuaikan dengan perkembangan pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah Orde Baru mengakibatkan perkembangan LSM pun mengikuti alur yang perkembangan tersebut. Seorang aktivis LSM dan sekaligus sebagai pengamat LSM yaitu David Korten mengkategorisasikan perkembangan LSM ini kedalam empat generasi berdasarkan strategi yang dipilihnya :

Generasi Pertama mengambil peran sebagai pelaku langsung dalam mengatasi persoalan masyarakat. Pendekatannya adalah *derma*, dengan usaha untuk memenuhi sesuatu yang kurang dalam masyarakat misalnya kebutuhan akan kesehatan, makanan, pendidikan dan sebagainya. Generasi ini disebut sebagai *relief and welfare*. LSM generasi ini memfokuskan kegiatannya pada kegiatan amal untuk anggota masyarakat yang menyandang masalah sosial seperti anak yatim, penderita cacat orang lanjut usia dan sebagainya.

Generasi Kedua memusatkan perhatiannya pada upaya agar LSM dapat mengembangkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kehidupan mereka

sendiri. Peran LSM disini bukan sebagai pelaku langsung tapi sebagai penggerak saja. Orientasi kegiatannya adalah proyek-proyek pengembangan masyarakat. Generasi ini disebut *small scale, self reliance local developmen*.

LSM generasi ini melihat masalah sosial dengan lebih kompleks. Tidak sekedar melihat soal yang langsung kelihatan saja, tetapi mencari akar sebabnya dan mengaitkan dengan soal kebijakan pembangunan. Fokus kegiatannya ada pada upaya membantu masyarakat untuk memecahkan masalah mereka. Misalnya adalah program-program peningkatan pendapatan, industri kerajinan, pertanian, teknologi tepat, dan sebagainya semboyannya adalah berikan pancing dan bukan ikannya.

Generasi Ketiga memiliki pandangan yang lebih jauh lagi. Keadaan di tingkat lokal dilihat sebagai akibat saja dari masalah regional atau nasional. Masalah mikro dalam masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan masalah politik pembangunan nasional. Karena itu penanggulangan mendasar dilihat hanya bisa dimungkinkan kalau ada perubahan struktural. Kesadaran seperti itulah yang tumbuh pada LSM generasi ini bersamaan dengan otokritiknya atas LSM generasi sebelumnya sebagai "*pengrajin sosial*". LSM generasi ini disebut sebagai *sustainable system development*.

Generasi keempat adalah LSM yang termasuk bagian dari gerakan masyarakat dan disebut sebagai *people movement*. Generasi ini berusaha agar ada transformasi struktural sosial dalam masyarakat dan di setiap sektor pembangunan yang mempengaruhi kehidupan. Visi dasarnya adalah cita-cita terciptanya dunia baru yang lebih baik. Karena dibutuhkan keterlibatan semua penduduk dunia. Ciri

gerakan ini dimotori oleh gagasan dan bukan organisasi yang terstruktur. (Saidi Zaim ;1995; hal 5 - 7).

Selain penjelasan di atas, David C Korten juga memberikan gambaran yang jelas mengenai strategi orientasi perkembangan LSM Indonesia pada tabel berikut:

Tabel 1
STRATEGI ORIENTASI PENGEMBANGAN
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM
EMPAT GENERASI

	Generasi I	Generasi II	Generasi III	Generasi IV
Ciri - Ciri	Kreatif dan kesejahteraan	Pengembangan masyarakat	Sistim pengembangan yang berkelanjutan	Gerakan sosial masyarakat
Permasalahan yang ditangani	Bantuan materi dan pelayanan	Lokal masyarakat	Hambatan kebijakan dan kelembagaan	Ketidaksinambungan visi pergerakan
Jangka waktu	Mendesak	Berdasarkan alur proyek	10-20 tahun	Jangka yang sangat panjang
Lingkup	Individu atau keluarga	Tetangga dan desa	Wilayah atau negara	Nasional atau global
Aktor penggerak	LSM	LSM dan masyarakat	Semua lembaga pemerintah dan swasta yang terkait	Jaringan yang luas dari masyarakat dan organisasi
Peran LSM	Pelaku	Mobilisator	Katalisator	Aktivis
Orientasi manajemen	Manement logistik	Manejemet proyek	Menejement strategi	Berkoalisi dan penguatan jaringan sendiri
Pengembangan pendidikan	Makanan tambahan makanan untuk anak	Mendorong masyarakat untuk menolong diri sendiri	Mentransformasi kan lembaga yang bermasalah	Berpikir dan berindak secara luas meliputi bumi dan luar angkasa

Sumber : David C. Korten, " *Evolving Roles of development oriented NGOs in Asia,*" makalah tidak diterbitkan 6, Februari 1990.

Selain mencoba melihat perkembangan LSM di Indonesia yang di utarakan oleh pengamat LSM sekaligus aktifis kita perlu juga melihat perkembangan LSM dari tahun ke tahun yang menggambarkan perkembangan serta keberadaan LSM Indonesia. Adapun perkembangan LSM Indonesia dari tahun ketahun dapat terlihat jelas berikut ini :

3.1 LSM 1960-an

Perkembangan bentuk LSM tahun 1960-an didapatkan atau ditemui dua bentuk LSM yang ternyata sangat mempengaruhi keberadaan dari LSM tahun 1960-an. Adapun kedua bentuk LSM tersebut sebagai berikut :

- Organisasi Primodial *grassroot* : umumnya LSM jenis ini mengacu pada kepentingan kelompok kecil (khususnya golongan miskin) dan dilandasi dengan kepentingan bersama (afiliasi keagamaan atau kekerabatan dekat). LSM jenis ini biasanya merupakan “ *Organisasi Rakyat* “ dengan struktur organisasi longgar, berukuran kecil, bersifat lokal, terpecah, kurang terorganisir, dan mengacu pada kelangsung hidupnya. Rasa kebersamaan dikalangan anggota bersifat mekanistik dengan sifat kepemimpinan yang tradisional.
- Organisasi Amal : juga fenomena kelas menengah, kebanyakan dibentuk untuk tujuan mengumpulkan dana dari masyarakat untuk kemudian disumbangkan guna menolong kaum miskin, para penyandang cacat baik fisik maupun mental dalam bentuk bantuan pengobatan. Strategi yang digunakan pada kegiatan ini ialah langsung menangani kasus-kasus kekurangan pangan, kelaparan, dan kemiskinan. Kebanyakan bersendikan keagamaan atau kemanusiaan, dan dibandingkan dengan jenis organisasi kerakyatan yang tadi (No.1), lebih besar, lebih terstruktur, dan lebih beragam kegiatannya. Keanggotaan dan kepemimpinan memperlihatkan adanya campuran lebih besar antara rasa kebersamaan anggota lebih terorganisasi dan mekanistik, serta kepemimpinan bergaya tradisional penuh karismatik dan formal. (Prisma ; April 1988; hal 17).

3.2 LSM 1970-an

Pada akhir tahun 1960-an dan awal 1970-an yang ditandai dengan gelora pembangunan dan upaya mempropagandakan semangat membangun lahiriah jenis LSM baru. Masyarakat mulai melihat bahwa kemiskinan dan masalah yang berkaitan dengan itu, tidak bisa diatasi dengan penyediaan bahan pangan, obat-obatan, dan sebagainya. Mulai disadari bahwa perbaikan hidup golongan miskin akan bergantung pada kemampuan mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan dari sumber-sumber yang tersedia bagi mereka. LSM yang dibentuk untuk menolong golongan miskin. (Prisma ; April 1988).

Jenis LSM ini terutama adalah : organisasi pembangunan setempat berskala kecil, dikelola oleh kelas menengah dan menekankan pada program-program pembangunan berskala kecil (bukan sektoral) melalui berbagai prakarsa di bidang kesehatan, pertanian, industri kecil, teknologi tepat guna, dan sebagainya. Strategi perjuangannya dilandasi upaya untuk memajukan kemandirian dan keswadayaan masyarakat dalam merumuskan masalah yang dihadapi, menghimpun sumber daya serta dan baik dari dalam maupun dari luar masyarakat setempat menyusun rencana untuk menanggulangi masalah tersebut dalam melaksanakan kegiatannya.

Kelahiran LSM jenis ini dapat dipandang sebagai reaksi bukan saja terhadap kelemahan organisasi amal, tetapi juga terhadap sifat pembangunan pada masa itu sangat mengacu pada pertumbuhan ekonomi disertai dengan keyakinan akan kebenaran teori "*penetesan kebawah*" masa itu dicerminkan oleh semakin

kuatnya dominasi pemerintah, berlimpahnya pendapatan pemerintah dari minyak bumi, besarnya bantuan negeri serta populernya penekatan *Top Down* di kalangan pemimpin pemerintahan.

Selain itu bermunculnya LSM pada masa ini merupakan bagian diskusi kritik terhadap developmentisme dan pemerintah Orde Baru. Dari sekian banyak LSM yang bermunculan ada beberapa LSM yang cukup menonjol pada masa itu, mereka adalah ; Bina Swadaya yang didirikan oleh Bambang Ismawan dan kawan-kawan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) oleh Adan Buyung Nasution dan kawan-kawan, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) oleh Nono Anwar Makarim, Ismaid Hadad dan lain-lain, Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) oleh Permadi dan kawan-kawan, Yayasan Indonesia Sejahtera (YIS) oleh Lukas Hendrarta dan Soetrisno KH, Sekretariat Bina Desa oleh Bambang Ismawan, Goerge J. Aditjondro dan lain-lain, Lembaga Studi Pembangunan (LSP) oleh Adi Sasono dan kawan-kawan, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) oleh Emil Salim, Erna Witular dan lain-lain. Kesemuanya ini mencerminkan satu generasi awal kalangan aktifis pasca Orde lama, yang ternyata banyak diantaranya ikut mendirikan Orde Baru. (Prisma ; Juli 1996; hal 36).

Para aktifis yang tergabung dalam komunitas LSM masa ini tumbuh karena formasi politik Orde Baru era 1970-an. Ilusi akan perubahan dan perbaikan sistim mulai berubah menjadi sikap kritis terhadap kecenderungan penyimpangan. Pada tahap ini Mahasiswa sebagai kaum intelektual mulai melancarkan kritik terhadap keberadaan Orde Baru, Kritik yang dilakukan para mahasiswa akhirnya

berujung pada protes terhadap strategi proses pembangunan yang dilakukan oleh Orde Baru.

Akibat dari kritik yang dilontarkan kepada pemerintah oleh mahasiswa dan puncaknya pada peristiwa malari pada tahun 1974 yang mengakibatkan banyak kaum intelektual mahasiswa harus cebloskan kedalam penjara, maka hubungan antara kaum intelektual dengan pemerintah putus dan mulai saat itu timbul berbagai kegiatan alternatif yang salah satunya adalah LSM. Namun tak dapat di pungkiri lagi bahwa disisi lain gerakan mahasiswa tahun 1978 turut memberikan arah perjuangan bagi keberadaan LSM di Indonesia. (Prisma ; Juli 1996; hal 36).

3.3 LSM 1980 – an

Pada awal tahun 1980-an, bangkit sebuah kesadaran yang besar tentang pentingnya partisipasi dalam proses pembangunan, serta perlunya dicari terobosan untuk mengadakan perombakan secara demokratis dan damai. Hal tersebut memberikan sebuah tantangan baru bagi LSM-LSM di Indonesia. Dari pengalaman dilapangan masa lalu LSM mendapat pelajaran bahwa upaya meningkatkan taraf kesejahteraan kelompok layanan dapat berhasil melalui pelaksanaan kegiatan pembangunan kecil-kecilan, akan tetapi harus disadari bahwa dalam sebuah sistim politik, sosial ekonomi, dan sosial yang sudah mapan, “peningkatan“ tersebut sering kali kurang berarti atau bahkan sekedar bersifat sesaat. (Prisma ; April 1988; hal 19).

Kritik dikalangan LSM sering mendukung pula peringatan agar LSM jangan sekedar menjadi pengarajin kemasyarakatan dan mencegah timbulnya kaum

kapitalis 'teri' yang memeras lapisan dibawahnya. Kritik diri ini mendorong banyak LSM untuk merumuskan kembali masalah-masalah yang mereka hadapi serta tujuan yang mereka kejar. Dari kritik ini kemudian muncul LSM jenis lain yang berorientasi pada perubahan struktural, yang dengan tujuan jangka pendeknya ialah menciptakan perubahan struktural dan kelembagaan dibidang ekonomi, politik, dan sosial. Sejumlah masalah menghambat pada saat itu, diantaranya kemiskinan struktural, bantuan hukum, monopoli, ketergantungan, sentralisasi, rejeminsasi, pengkotak-kotakkan dan birokratisasi. Hampir pada waktu yang bersamaan timbul pula LSM yang memperoleh bantuan dari pemerintah dan yang memperoleh dukungan dari perusahaan multinasional yang mengalami masa jaya dalam kehidupan ekonomi selama dua dasa warsa sebelumnya.

Selain itu, pada periode ini merupakan periode yang mempertemukan berbagai identitas, bentuk serta pandangan. Terbentuk jaringan ini merupakan sebuah inisiatif beberapa LSM yang bertujuan untuk saling memperkuat serta kerja sama. Akibat dari adanya jaringan ini maka terbentuklah berbagai kelompok yang merupakan cerminan adanya bentuk jaringan tersebut. Misalnya, Walhi yang terbentuk dari adanya penggabungan kelompok sepuluh, SKEPHI (sekretariat kerjasama pelestarian lingkungan hidup) dan lain-lain.

Pada periode ini juga ditandai dengan adanya dominasi dari LSM – LSM besar terhadap LSM – LSM kecil, kecendangan disini dapat dilihat dari dominasi dan yang dengan jelas akan menimbulkan kecemburuan bagi LSM kecil. Situasi semacam ini mengakibatkan timbulnya *status qua* bagi LSM-LSM besar yang

ditandai dengan timbulnya istilah 13 LSM besar⁵. Artinya ada 13 LSM yang dianggap besar pada masa ini dengan alasan merekalah yang memiliki akses, kekutan dana, *lobbying*, dan fasilitas yang digunakan untuk memperkuat keberadaan LSM tersebut. LSM besar ini yang termasuk dalam kategori LSM generasi pertama cenderung tidak dapat membebaskan diri dari *establishment*, dan *developmentalis*. Mereka tidak lagi mampu untuk melakukan kritik sistem sosial politik secara efektif. Mereka pun tidak mampu untuk membuat terobosan berarti terhadap perubahan bagi masyarakat. (Prisma ; Juli 1996 ; hal 39).

Pada pertengahan 1980-an pemerintah hendak menundangkan UU mengenai ke ORMASAN. Rancangan ini merupakan salah satu paket perundang-undangan pembangunan kehidupan politik yang diajukan oleh Mendragri Soeparjdo Rustam pada 23 Juni 1984 (Prisma ; Juli 1996 ; hal 41). Kalangan LSM juga termasuk dalam aturan ini memberikan tanggapan mereka dalam wujud kekhawatiran mereka. Umumnya kekhawatiran yang mereka lontarkan berupa hambatan administrasi yang sangat besar, termasuk pengaturan birokratis, jika pengawasan ini dilakukan secara tuntas oleh pemerintah. Besarnya campur tangan pemerintah dalam prioritas kerja LSM, karena segala sesuatu harus sepengetahuan pemerintah, dan besarnya pemburan LSM yang karena kehidupannya ditentukan oleh izin dan sepietuhan pemerintah menjadikan ruang gerak dari LSM dan

⁵ 13 LSM besar tersebut adalah : YLBHI, Bina Desa, Bina Swadaya, LP3ES, LSP, YIS, BK3, YLK, WALHI, DIAN DESA, P3M, PKBI, YPMD. Kelompok 13 ini berawal dari dari prakarsa MAF-CIDA yang di undang untuk mendiskusikan hubungan kerja sama dengan Kanada. Penjelasan ini dapat dibaca Tulisan Bonnie Setiawan dalam Prisma 7 Juli 1996.

ORMAS lainnya semakin sempit. Terlebih lagi pemberian bantuan dari lembaga donor asing harus mendapat izin dari pemerintah. Akibatnya timbul tarik menarik interpersasi serta keresahan tidak terputuskan dikalangan LSM sendiri. Akhirnya pemerintah mengakui keberadaan UU tersebut yang tidaklah mencakup LSM karena adanya perbedaan mendasar antara LSM dengan ORMAS lainnya.

Dinamika internal LSM pertengahan 1980-an, meskipun masih tidak jelas mencerminkan ketidakpuasan terhadap LSM-LSM besar. Hasilnya melalui sebuah pertemuan yang diselenggarakan di Bukit Tinggi (1987) teretuslah beberapa pemikiran yang mencoba untuk mengoreksi keadaan yang terjadi. Disamping itu dengan semakin kuatnya jaringan-jaringan LSM dalam cara dan bentuk, ide-ide baru mulai bermunculan di banyak daerah yang memperkuat komunikasi dan *brainstroming* yang efektif. Aktifis semakin banyak jumlahnya dan lebih dari *advence* mulai mengelilingi Indonesia melakukan pelatihan, forum, tukar gagasan, dan perlahan-lahan mulai mengembangkan LSM yang sama. LSM daerah, karena kondisi sosial ekonomi politiknya yang terbatas dan terbelakang, mulai mendapat ide-ide baru yang dengan sendirinya mengarah kepada perubahan.

3.4 LSM 1990 -an

Tak dapat dipungkiri lagi bahwa gerakan mahasiswa memegang peranan penting dalam perkembangan LSM. Gerakan mahasiswa yang mulai marak awal 1990-an yang tetap hadir sebagai kelompok oposisi atau dengan kata lain bahwa keberadaan gerakan mahasiswa tetap terus memberikan kritik-kritik yang berarti bagi perkembangan LSM. Sebagai sebuah gerakan, mahasiswa mulai dengan militansi dan radikalisme yang tinggi serta berupaya mengoyahkan kelumpuhan gerakan demokarsi. Aksi-aksi yang mereka lakukan kebanyakan menyinggung masalah pertanahan dan perburuhan dengan memakai bentuk nonparlemen. Issue besar yang sering muncul ke permukaan dalam setiap aksi para mahasiswa seperti kasus, Badega, Cimacan, Kedung Ombo, Rancamaya, Gilli Terawang. (Prisma ; Juli 1996 ; hal 43). Model penanganan kasus yang sama antara LSM dan Gerakan Mahasiswa membuat interaksi antara kedua elemen tersebut semakin baik malapun tersendat-sendat karena adanya sikap anti LSM. Namun belakangan sikap seperti ini mulai mencair karena kebutuhan mereka akan dukungan LSM yang sesungguhnya mempunyai keahlian dalam bidangnya dan dalam kenyataannya kebanyakan aktivis LSM merupakan mantan aktivis gerakan mahasiswa.

Semakin disadari bahwa gerakan mahasiswa dan gerakan LSM sama-sama saling membutuhkan khususnya dalam bergandengan dengan sektor-sektor buruh, tani, dan lain-lain dalam membangun gerakan demokrasi. A. Buyung Nasution mengatakan bahwa “ pada tahun-tahun terakhir ini tumbuh kelompok-kelompok

baru, LSM, mahasiswa aktivis didalam dan luar kampus, yang berjuang untuk petani, buruh, lingkungan hidup dan lain-lain. Ini semua merupakan *embrio* dari tumbuhnya kekuatan-kekuatan *embrio* rakyat baru yang akan membawa panji-panji demokrasi di tanah air". (Prisma ; Juli 1996 ; hal 42).

Selain itu pada dekade tahun 1990-an kualisi berbagai LSM, ternyata membawa warna tersendiri bagi perkembangan LSM dekade ini. Hal semacam ini dapat di bentuknya berbagai macam forum yang sudah tentu dengan maksud supaya saling mempengaruhi dan memberikan informasi serta menguatkan jaringan antara satu LSM dengan LSM lain untuk menuju kearah penggabungan kekuatan demokrasi dalam masyarakat.

Pada tahun 1990-an ditandai pula oleh merebaknya forum-forum LSM. Terbentuknya berbagai forum yang memwadahi keberadaan LSM ini merupakan forum kelanjutan pengembangan jaringan berbagai forum perintisan dan penguatan yang dibangun pada awal tahun 1980-an dan yang telah ada pertengahan tahun 1980-an. Forum-forum ini merupakan wadah bagi para aktivis LSM dalam mengembangkan kerja sama program namun kegiatan yang lebih nyata bagi konsolidasi di tingkat wilayah. (Prisma ; Juli 1996 ; hal 43). Masih banyak pandangan dan indentitas yang hendak dibangun, terutama didaerah, serta sifatnya yang tidak permanen dan tidak struktural.

Akibat dari perkembangan-perkembangan yang terjadi, membuat banyak perombakan-perombakan yang terjadi dalam tubuh LSM Indonesia yang sudah tentu tidak hanya melihat permasalahan *developmentalime* akan tetapi sudah mulai

melihat permasalahan lain seperti buruh, feminisme, lingkungan dan sebagainya. Selain itu perkembangan yang menarik di era 90-an adalah dengan bermunculan organisasi feminis yaitu sebuah gerakan yang menentang sistem *Partriarki* dan melakukan pembaharuan untuk emansipasi (pembebasan) terhadap kaum perempuan. (Prisma 7 Juli 1996: hal 45). Gerakan ini mulai muncul lagi ketika pada dekade tahun 1980-an sempat muncul namun karena mendapat tekanan dari pemerintah Orde Baru yang mensubordinatkan "kaum perempuan". LSM-LSM Feminisme ini seperti YASANTI (Yayasan Annisia Swasti, 1982), di Yogyakarta, Kalyanamitra (1985) di Jakarta, dan PPSW (Pusat Pengembangan sumber Daya Wanita, 1986) di Jakarta. Baru setelah itu banyak bermunculan organisasi-organisasi serupa seperti FDPY (Forum Diskusi Perempuan Yogya), Solidaritas Perempuan, YPM (Yayasan Perempuan Merdeka), LSPPA (Lembaga Studi pengembangan perempuan dan anak). Kehadiran banyak LSM yang berhaluan Feminisme ternyata kurang *solid* akibat kurangnya perspektif yang jelas mengenai kedudukan gerakan feminisme pada tahun itu. Selain itu masih banyak LSM yang melakukan penolakan terhadap keberadaan organisasi ini karena bagi mereka gerakan ini masih kurang penting jika dibandingkan dengan isu-isu Global lainnya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada tahun 1990-an perubahan strategis perjuangan yang dilakukan oleh LSM telah sampai pada generasi IV. Generasi ini yang bagi David C Korten dianggap sebagai sebuah generasi yang mencirikan gerakan sosial masyarakat dengan peran LSM tidak sebagai katalisator

namun sebagai aktivis yang sudah barang tentu ingin lebih mewujudkan kehidupan dalam struktur masyarakat yang lebih demokratis.

3.5 LSM Yogyakarta

LSM yang dikenal sebagai salah satu kekuatan alternatif yang ada masyarakat ditengah hempitan serta kekuatan dari negara dengan idiologi pembangunannya ternyata berdampak juga bagi masyarakat Yogyakarta. Kebanyakan LSM yang berada di Yogyakarta didirikan oleh kaum terpelajar atau sarjana pernah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. LSM di Yogyakarta hadir sekitar tahun 1970-an yang ditandai dengan berdirinya LSM Bina Desa.

Pada awal hadirnya LSM di Yogyakarta mempunyai bidang kegiatan yang lebih kepada kelompok-kelompok *organisasi amal* yang bergerak dalam bidang-bidang seperti kesehatan, pangan, pertanian dan penerapan teknologi tepat guna yang berusaha untuk meningkatkan pendapatan, komunikasi massa, pendidikan dan pelatihan serta bantuan hukum, dengan tujuan hampir sama yaitu mengembangkan dan membantu serta meningkatkan kondisi masyarakat yang secara sosial dan ekonomis lemah (Amir E Siregar ; Prisma 4 ; 1988 ; 49).

Namun dalam perkembangan selanjutnya proses perubahan yang dilakukan oleh LSM yang ada di Yogyakarta sangat dipengaruhi oleh kebanyakan LSM yang ada diluar Yogyakarta lewat berbagai pertemuan yang dilakukan. Namun hal ini tidak terlalu signifikan karena biasanya terjadi secara individual dari para aktivis LSM itu sendiri dengan aktivis yang lain. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Antok, ketua Forum LSM Yogyakarta yang mengatakan bahwa

“ Kerja-kerja pengorganisasian masyarakat kebanyakan dilakukan secara individual oleh teman-teman LSM sendiri, sementara pengaruh dari luar hanya lebih pada hubungan antar para aktivis“.

Sampai saat ini dengan jumlah yang kurang lebih sekitar 300-an organisasi LSM yang berada di Yogyakarta dengan agenda utama untuk melakukan perubahan-perubahan di tingkat masyarakat, sudah barang tentu memiliki banyak sekali bidang kerja sesuai dengan kebutuhan dari lembaga tersebut adapun bidang tersebut tergambar dengan jelas pada tabel berikut ini :

Tabel 2
Fokus Kegiatan LSM Yogyakarta

ISSUE	SASARAN	SEKTOR	AKTIVITAS
1. Demokratisasi	1. Petani	1. Pengembangan Masyarakat.	Pelatihan
2. Ham	2. Buruh	2. Kesejahteraan masyarakat.	Pendampingan
3. Buruh	3. Anak Jalanan	3. Pengembangan Tehnologi.	Pencerbitan.
4. Lingkungan	4. Santri	4. Pengembangan Obat Tradisional.	Penelitian
5. Perempuan	5. Pekerja Seks	5. Renewable Energi.	Advokasi
6. Agraria	6. Pedagang kecil	6. Pengembangan Usaha Kecil.	Simpan - Pinjam
7. Ekonomi	7. Perajin	7. Pengorganisasian Masyarakat.	Konservasi
8. Kesehatan	8. Difabel		Teknologi
9. Keadilan	9. Tukang becak		Pendidikan
10. Anak	10. Mahasiswa		Pendidikan
11. Pariwisata			Pemasaran
			Bantuan Hukum
			Pendokumentasian
			Sadar Lingkungan
			Air Bersih
			Sanitasi
			Pengelolaan Limbah
			Perkoperasian
			Seni - budaya .

Sumber : Sketsa Kegiatan Partisipan LSM Yogyakarta 1998 - 2000

Dengan melihat tabel di atas dapat digambarkan dengan jelas bagaimana peta dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh kawan-kawan LSM Yogyakarta. Kebutuhan akan perubahan yang dicita-citakan oleh LSM ternyata tidak dapat berjalan dengan mulus karena kebanyakan LSM berjalan sendiri-sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan lokal dari kawan-kawan LSM Yogyakarta membentuk apa yang dinamakan dengan jaringan kerja. Menurut Antok Ketua Forum LSM Yogyakarta

Bahwa kesadaran untuk membuat jaringan ini membuat berlandaskan pada satu motivasi untuk mendorong proses perubahan yang berarti ditingkat masyarakat sebagai contoh misalnya di Yogyakarta ada jaringan petani yang mana jaringan ini sebagai sarana untuk menukar informasi dikalangan aktifis dalam melakukan kerja-kerja, walaupun hal ini terasa sangat sulit (Wawancara; 5 Desember 2001).

Untuk sampai kepada cita-cita tersebut masih memerlukan kerja-kerja serta perjuangan yang panjang. Sementara untuk kalangan LSM Yogyakarta sendiri masih sangat sulit untuk mewujudkan hal tersebut. Hal ini dikarenakan masih banyak masalah diantaranya seperti *pertama*, kebanyakan para aktifis LSM Yogyakarta tidak memiliki agenda yang jelas mengenai perubahan sosial. Kemudian yang *kedua*, pengelolaan LSM sendiri banyak para aktifisnya hanya memikirkan profit orientit jadi kurang memikirkan kerja bagi masyarakat.

Dari kebanyakan kegiatan yang diselenggarakan oleh LSM Yogyakarta untuk saat ini fokus dari berbagai tersebut adalah mengenai kebijakan Publik, jadi bagaimana kebijakan publik itu bisa dipengaruhi untuk memberikan ruang publik kepada masyarakat. Dan pada akhirnya kebijakan publik yang dihasilkan dapat

dipengaruhi oleh masyarakat dan bukan hanya dipengaruhi namun juga ditentukan oleh masyarakat.

Pendidikan politik yang dilakukan oleh LSM Yogyakarta selama ini, menurut Antok Ketua Forum LSM Yogyakarta sudah banyak kombinasi kegiatan yang *karikatif* dengan kegiatan pendidikan politik yang mana pendidikan politik tidak hanya pada perkembangan ekonomi namun sudah mengkombinasikan dengan pendekatan lain seperti demokratisasi. Adanya kesadaran untuk melakukan pendidikan politik ini dilandaskan oleh satu kesadaran mengenai perubahan sosial dengan menggunakan paradigma transformatif.

IV. Gerakan LSM dan Gerakan Rakyat

Perkembangan politik yang cenderung semakin konservatif memang menempatkan LSM pada posisi yang tidak menguntungkan. Pemerintah yang kurang menyadari pentingnya fungsi kontrol yang akan dilakukan oleh LSM, justru menganggap LSM sebagai bagian dari oposisi dari negara. Dengan demikian tujuan internal dari LSM semakin terlupakan, hal ini disebabkan karena LSM harus menghadapi tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh pemerintah.

Sebagai sebuah gerakan kelas menengah yang memperjuangkan demokrasi, LSM tidak dapat dipisahkan dengan gerakan rakyat. Sejak tahun 1980-an dimulai diskursus bagi pemikiran mengenai visi baru LSM yang menolak serta mengkritik secara tegas kecenderungan developmentisme di dalam diri mereka. (Prisma; 7 Juli 1996 ; 47).

Dalam sebuah rumusan yang dikeluarkan oleh Yayasan Bina Desa, " LSM harus dapat melayani pertumbuhan prakarsa masyarakat dan aktualisasi potensi-potensi transformatif masyarakat; memperkuat organisasi rakyat, memperkuat jaringan demokrasi pada semua tingkatan dan sektor kehidupan; aktif dan efektif dalam pembelaan isu demokrasi dan ketidakadilan (Prisma; 7 Juli 1996 ; 47). Dengan demikian posisi LSM tidak lagi sebagai satu lembaga yang jauh dari masyarakat namun harus benar-benar lahir dari dalam masyarakat sendiri dan sama sama berjuang untuk perubahan.

Kecenderuan LSM untuk menjadi bagian dari gerakan rakyat memang tidak bisa diabaikan lagi. Oleh sebab itu **David C Korten** mencoba merumuskan

gerakan rakyat dalam prespektif “ *Pembangunan Berpusat pada Rakyat* “. Berdasarkan pengalaman yang berhubungan dengan lembaga-lembaga pembangunan dan LSM. Korten, merumuskan kerangka kerja bagi LSM yang akhirnya disebut sebagai skema kerja generasi LSM. Skema generasi LSM tersebut adalah :

1. Generasi Bantuan dan Peringatan dan Kesejahteraan.
2. Generasi Pembangunan Masyarakat.
3. Generasi pembangunan sistim kelanjutan
4. Generasi Gerakan rakyat (Prisma; 7 Juli 1996 ; 47).

Namun rumusan generasi yang ditawarkan oleh Korten ini menunjukkan banyak kelemahan. Skema yang ditawarkan ini lebih pantas ditempatkan pada kategorisasi mengenai perkembangan LSM dan bukan sebuah konsep generasi yang evolusioner dan linier. Rumusannya mengenai gerakan rakyat adalah “ mengerakkan buah massa kritis yang penuh dengan inisiatif mandiri dan tidak tersentralisir agar mendukung visi sosial “. Menurut Korten tugas organisasi sukarela generasi keempat adalah menghubungkan dan menggerakkan jaringan swakelola yang sama sekali tidak berada di bawah kekuasaan.

Rumusan Korten mengenai gerakan rakyat sebenarnya cukup baik, terutama bila dikaitkan dengan gerakan Masyarakat Sipil. Sama halnya gerakan rakyat dalam prespektif Gramsci yang memandang bahwa konsep gerakan rakyat sebagai sebuah konsep masyarakat yang terorganisir (Fakih;1996; hal 59). Bagi Gramsci Masyarakat Sipil adalah di mana seseorang menjadi sadar dan di mana seseorang pertama kali ikut dalam aksi politik.

Gerakan rakyat sering dipahami sebagai dari artinya yang pernah ada sebelumnya, saat organisasi massa rakyat menjadi afiliasi partai politik. Pengertian ini menjadi kurang *genuine* karena rakyat diletakkan sebagai alat yang sah dari partai politik dengan perangkat idologinya. Menurut tinjauan politik lama keberadaan gerakan rakyat harus dilihat kaitannya dengan partai politik hal demikian menyebabkan manipulasi dalam partai politik, meskipun rakyat menyampaikan aspirasinya kedalam partai politik, tetapi tidak dengan sendirinya organisasi gerakan rakyat identik dengan partai politik baik dalam pemikiran maupun idologinya. Dalam perkembangannya organisasi rakyat dan gerakan rakyat mempunyai aspirasi sendiri lebih murni yang menolak tunduk pada kemauan partai politik. Gerakan rakyat mempunyai aspek murni sebagai demokrasi langsung dari – oleh - untuk rakyat tanpa memerlukan mediasi partai politik atau kelompok kepentingan.

Nampak ada persinggungan antara LSM dengan organisasi gerakan rakyat. Meskipun masih tampak kebingungan disekitar peran LSM dalam organisasi rakyat ataupun posisi LSM dalam organisasi gerakan rakyat, sebenarnya mulai muncul gerakan yang dapat menjelaskan pejelasan ini. Oleh karena itu perlu penjelasan mengenai gerakan rakyat, selain itu terutama semakin besarnya pengaruh NGO di Barat, juga mendefinisikan gerakan rakyat. Hal ini kemudian memunculkan perbedaan antara paradigma gerakan rakyat lama dengan paradigma gerakan rakyat baru.

Paradigma gerakan rakyat baru membuat semacam koreksi dengan landasan bahwa gerakan rakyat merupakan bagian paling murni dan karenanya harus merupakan suatu yang otonom. Gerakan rakyat merupakan bagian dari kontrol yang efektif dalam menjaga kemurnian hak-hak maupun nilai-nilai dasar kemanusiaan. Gerakan rakyat yang murni tidak akan dimanipulasi. Dengan demikian gerakan rakyat memikirkan juga bagaimana menjaga kelangsungan hak-hak dasar manusia, yaitu sumber daya alam, lingkungan hidup, hak-hak asasi dan keberlangsungan umat manusia.

Hal ini membuat semua semua memberikan aspek sangat kuat dari paradigma baru yang intinya mempermasalahkan pertarungan umat manusia dalam situasi global sekarang di bumi yang hanya satu. Gerakan rakyat dalam hal ini telah mendapat elaborasi baru. Gerakan rakyat ini coba di perjelas dengan lewat konsep Masyarakat Sipil. Masyarakat Sipil adalah suatu agregasi atau pencampuran kepentingan dimana kepentingan sempit di transformasi menjadi pandangan yang lebih universal sebagai ideologi yang dipakai dan ubah, serta dimana aliansi dibentuk. Dalam konteks ini konsep masyarakat sipil adalah suatu dunia di mana rakyat membuat perubahan dan menciptakan sejarah. (Fakih;1996; hal 60).

Munculnya pemikiran seperti ini membuat LSM tampil dengan sebuah paradigma yang baru. Menurut Roem Topatimasang terdapat lima "paradigma dasar" bagi gerakan LSM yang mana kelima paradigma ini merupakan rangkuman dari pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh Hope, Timmel, Eldridge, Kothari

yang mengatakan bahwa kelima paradigma tersebut adalah (Prisma ; 7 juli 1996, hal 50) :

1. Kesejahteraan
2. Modernisasi
3. Reformasi
4. Liberisasi
5. Transformasi

Dua pemikiran yang pertama merupakan pemikiran *Konservatif* sedangkan ketiga lainnya merupakan pemikiran *Radikal*. Dalam gerakan rakyat saat ini paradigma yang cocok untuk saat ini adalah gerakan yang bersifat "*Liberisasi*" dan "*Transformasi*" dari pandangan politik yang radikal namun disini pengertian radikal bukan radikal anarkis namun gerakan radikal yang progresif yaitu pandangan yang mengarah pada kemajuan kualitas umat manusia.

V. LSM dan Proses Pemberdayaan Masyarakat Sipil.

Untuk membentuk masyarakat yang demokratis dan terlepas dari berbagai bentuk keterindasan, peran komponen-komponen dalam masyarakat sangatlah besar. Komponen-komponen dalam masyarakat tersebut lahir atas berbagai kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Salah satu komponen masyarakat yang ada dari sekian banyak komponen dalam masyarakat adalah LSM.

Peranan LSM dalam ini dapat lihat dari berbagai usaha memperkuat gerakan-gerakan demokratisasi yang ada dalam masyarakat terutama masyarakat *akar rumput* melalui berbagai aktivitas pendampingan, pembelaan, dan penyadaran. (Hikam;1996;hal 256). Selain memberikan pendampingan dan pemberdayaan kepada masyarakat sipil, LSM juga konsep-konsep strategis guna mendirikan

Front Demokrasi yang kuat berdasarkan pengalaman kongrit yang mereka peroleh di lapangan.

Dari pengalaman yang mereka dapatkan di lapangan kemudian akan timbul beberapa karakter khusus yang dimiliki oleh LSM dan berguna bagi proses pemberdayaan masyarakat sipil. Bagi Muhamad AS Hikam (1996) karakter-karakter yang dimiliki oleh LSM dalam proses pemberdayaan masyarakat sipil adalah : *Pertama*, LSM Indonesia yang jumlahnya cukup banyak dengan penyebaran yang cukup luas dan variasi program serta proyek yang berbeda-beda sehingga memungkinkan mereka mencapai mencapai daerah-daerah yang bermacam-macam corak dan lokasinya terpencil. *Kedua*, banyak LSM yang kemudian berperan sebagai alternatif bagi rakyat *marginal* yang suaranya hampir tidak pernah didengar, sehingga dengan demikian menjadi semacam substitusi bagi institusi politik yang ada.

Ketiga, LSM juga mempunyai jaringan yang luas baik pada tingkat nasional maupun internasional yang dapat difungsikan sebagai sarana menyebarluaskan informasi yang dapat difungsikan sebagai sarana menyebarkan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu ada juga beberapa kewajiban yang sangat penting yang harus dilakukan oleh LSM Indonesia adalah untuk mendukung pemberdayaan masyarakat sipil di masa depan. Termasuk disini keharusan untuk kembali merefleksikan secara kritis paradigma dominan yang dipergunakan oleh LSM dalam wacana dan kiprah dalam pembangunan agar bertindak sebagai aktor-aktor

dalam gerakan sosial yang baru, namun ternyata sering tampil sebagai agen-agen subkontraktor pembangunan baik dari lembaga milik pemerintah maupun swasta.

Selain itu juga LSM-LSM perlu pula memperbaiki kemampuan organisasi mereka yang secara langsung mempengaruhi posisi tawar mereka ketika berhadapan dengan pemerintah. Karena itu suatu keharusan bagi para tokoh dan aktifis LSM untuk mengetahui betul kekuatan dan kelemahannya dalam tugas memperdayakan masyarakat sipil (Hikam;1996;hal 258).

Sebagai suatu agenda jangka panjang, LSM memegang peranan penting sebagai agen *pendidikan politik* pada tingkat masyarakat yang paling bawah berkaitan dengan kesadaran mengenai hak-hak dasar politik. Hal ini *urgen* dilakukan, mengingat bahwa lapisan rakyat di bawah merupakan salah satu korban politik *depolitisasi* negara. Dengan jaringannya yang luas serta SDM yang cukup handal LSM dapat menciptakan dan menyebarluaskan program-program yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesadaran berpolitik maupun memberikan pembelaan kepada rakyat untuk berjuang demi hak-hak dasarnya.

VI. Kesimpulan

Berbicara mengenai Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM memang tidak akan pernah habisnya. LSM yang merupakan terjemahan langsung dari istilah asing NGO atau Non Organisation Organisation, yang pada awalnya di Indonesia dikenal dengan nama ORNOP namun dalam perkembangannya istilah ini masih dalam perdebatan yang panjang karena dikalangan aktivis sendiri terjakang masih bingung untuk menggunakan istilah mana yang tepat untuk dipakai.

LSM yang hadir di tengah masyarakat sebagai suatu organisasi alternatif dan merupakan sebuah respon terhadap fenomena pembangunan yang cenderung untuk mematikan ruang gerak dan kreatifitas masyarakat berusaha untuk melakukan proses perubahan agar supaya masyarakat dapat mandiri serta keluar dari berbagai bentuk ketidakadilan yang membelenggu dirinya. Dalam melakukan berbagai proses perubahan LSM melakukan kerja-kerja melalui pendampingan kepada masyarakat guna meningkatkan kemampuan partisipasi dari masyarakat oleh karena itu LSM sangat berbeda dengan organisasi-organisasi lain yang ada.

Sebagai sebuah organisasi yang melakukan kontrol terhadap negara LSM sudah tentu memiliki cita-cita yang sudah menjadi sebuah idiologi bersama dikalangan aktifis LSM. Cita-cita yang dimiliki oleh LSM adalah untuk meningkatkan derajat manusia yang manusiawi serta demokratis. Namun hal ini tidak akan selalu berjalan dengan mulus seiring karena banyak sekali permasalahan yang sudah barang tentu menjadi hambatan bagi keberadaan LSM di tengah masyarakat. Realitas yang sering kita jumpai adalah bahwa dalam memberikan

pendampingan terhadap masyarakat LSM sangat tergantung dengan lembaga dan atau sering disebut dengan lembaga donor, akhirnya masyarakat sering menjadi objek untuk dijual pada lembaga donor.

LSM Indonesia yang telah ada sebelum jaman kemerdekaan ternyata telah memberi warna sendiri bagi perubahan sosial di masyarakat. Perkembangan demi perkembangan yang membuat LSM terus berbenah diri mulai dari paradigma sampai pada cara dan kerja yang pada akhirnya membuat LSM sebagai sebuah fenomena sosial yang perlu dan terus dikembangkan, karena LSM Indonesia saat ini hadir sebagai sebuah alternatif dari tidak berfungsinya organ-organ negara untuk membebaskan masyarakat dari belenggu ketidakadilan.

Matinya negara dan unsur-unsur di dalamnya disebabkan karena negara terlalu mendominasi daya kreatifitas atau partisipasi masyarakat sehingga negara dengan leluasa menguasai masyarakat dengan ideologi pembangunannya yang dengan jelas tidak dapat memberikan sebuah perubahan yang berarti dalam masyarakat. Oleh karena itu untuk melakukan perubahan-perubahan yang ada dalam masyarakat diperlukan kerja-kerja ekstra dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat agar supaya dapat kembali untuk menjadi subjek dalam setiap pengambilan keputusan dari negara dengan demikian maka negara yang demokratis dapat terwujud.

Hal ini menyebabkan LSM yang selalu bekerja dari rakyat mempunyai peranan penting untuk melakukan sebuah transformasi sosial yang akan digunakan dalam melakukan perubahan-perubahan di tengah masyarakat, sehingga negara

demokratis dapat terwujud dengan baik. Walaupun pada kenyataannya LSM masih banyak permasalahan mulai dari ketergantungan pada lembaga dana, sumber daya aktifisnya sendiri, membuat LSM sendiri belum dapat tampil semaksimal mungkin sebagai sebuah organisasi kerakyatan yang bekerja bersama-sama dengan rakyat untuk melakukan gerakan-gerakan perubahan demi terciptanya masyarakat yang demokratis.

